

BAB IV

KESIMPULAN

Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini, temuan pemeriksaan dan karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019. Ciri kedaerahan yang digunakan sebagai variabel adalah tingkat kemandirian dan ketergantungan pada pemerintah pusat. Kinerja keuangan yang menjadi adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Menggunakan sampel data dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil pengujian, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Opini pemeriksaan Tahun 2016-2018 memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan opini pemeriksaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun (t-1) mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun (t).
- 2) Opini pemeriksaan Tahun 2016-2018 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Opini tidak terlalu mengindikasikan baik atau

buruknya tingkat efisiensi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun, opini lebih mencerminkan kewajaran atas penyajian LKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisyardani (2016).

- 3) Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016-2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Artha et al. (2018).
- 4) Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) Tahun 2016-2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Artha et al. (2018).
- 5) Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2016-2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019).
- 6) Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) Tahun 2016-2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015) Di sisi

lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Artha et al. (2018)

- 7) Tingkat kemandirian pemerintah daerah Tahun 2017-2019 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qowi dan Prabowo (2017) Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015).
- 8) Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Tahun 2017-2019 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisyardani (2016). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015).
- 9) Tingkat kemandirian daerah pada Tahun 2017-2019 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut.
- 10) Tingkat ketergantungan daerah pada Tahun 2017-2019 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2017-2019. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurdin (2015).